



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. ROSADI SESWANDHANA
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN ILMU BEDAH
3. NHK : 813709

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.802.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m²/100 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m²/280 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 785 m²/50 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.570.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m²/120 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 800.000.000
5. Tanah Seluas 782 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 782.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 709.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 79.500.000
2. MOBIL, MAZDA CX-5 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOBIL, NISSAN SERENA HIGHWAY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 228.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000



5.	MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp. 125.000.000
6.	MOBIL, DAIHATSU SIGRA Tahun 2018, HADIAH	Rp. 75.000.000
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 51.700.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp. ----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp. 3.341.120.912
F.	HARTA LAINNYA	Rp. ----
Sub Total		Rp. 10.903.820.912
III. HUTANG		Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp. 10.903.820.912

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.